Yogyakarta, 27 Desember 1954.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 6.
Tahun 1954

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 7 TAHUN 1954 (7/1954)

Tentang: Pemberian istirahat karena hamil.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Juli 1953 Nomor 9393/XV/A/53.

Mengingat: 1. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.

Menimbang: a. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1951 tentang "pemberian istirahat karena hamil" hanya berlaku untuk pegawai Negeri;
b. Bahwa memandang perlu untuk pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta diadakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1951;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 14 dan 29 Juli 1954;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN"Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian istirahat karena hamil" sebagai berikut:

Pasal 1

Kepada pegawai wanita yang telah kawin dan bekerja pada jabatan Daerah, maupun dalam jabatan tetap atau sementara yang telah bekerja sedikit-dikinya 1 tahun lamanya, dapat diberikan istirahat karena hamil oleh Dewan Pemerintah Daerah atau instansi/penjabat yang ditunjuk olehnya dengan perjanjian bersedia bekerja kembali setelah istirahatnya berakhir.

Pasal 2

- (1) Lamanya istirahat itu adalah satu setengah bulan sebelum tiba waktunya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandung.
- (2) Waktu istirahat ini dapat pula diperpanjang dengan satu setengah bulan kemudian, jikalau dalam suatu keterangan dokter dinyatakan, bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatan yang berkepentingan yang belum mengizinkan untuk bekerja lagi.

Pasal 3

Selama waktu istirahat tersebut dalam pasal 2, pegawai wanita yang bersangkutan mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan yang sah.

Pasal 4

Jika pegawai wanita yang bersangkutan mengabaikan perjanjian tersebut dalam pasal 1 dan tidak bekerja kembali dalam masa 6 bulan setelah istirahatnya berakhir, maka semua gaji dan penghasilan lain yang telah diterimanya selama masa istirahat itu dengan tidak bersyarat ditagih kembali dan istirahatnya itu dianggap seolah-olah diberikan sebagai istirahat diluar tanggungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dan hal-hal yang, walaupun sudah ditetapkan dalam peraturan ini, akan tetapi bersifat luar biasa, sehingga pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakadilan, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan, dan mempunyai kekuatan berlaku surut sampai dengan tanggal 7 Agustus 1951.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 29 Juli 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tersebut Surat Keputusan tanggal 30-10-1954 No. 218/1954.

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal, 27 Desember 1954

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1954

Tentang : Pemberian istirahat karena hamil.

PENJELASAN UMUM

Hingga kini Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai Peraturan tentang "Pemberian istirahat karena hamil".

Dalam hal pemberian istirahat karena hamil Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan sejenis dari Pemerintah Pusat, yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1951.

Karena Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa pegawai wanita yang telah kawin, maka sudah selayaknya, apabila Daerah memiliki Peraturan yang serupa dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1951 tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pegawai wanita yang telah kawin ialah pegawai wanita yang telah menikah dengan cara sah.

Artinya kata-kata "bekerja sedikit-dikitnya setahun lamanya", adalah bekerja aktif sedikit-dikitnya setahun terus menerus dalam jabatan Daerah, baik pada suatu Jawatan maupun Kantor Daerah.

Untuk mendapat istirahat tersebut, maka pegawai yang bersangkutan harus memajukan surat permintaan kepada Dewan Pemerintah Daerah atau instansi/penjabat yang ditunjuk olehnya, disertai surat keterangan seorang dokter atau bidan serta surat perjanjiannya, bahwa ia siap sedia akan bekerja kembali setelah istirahatnya berakhir, sedikit-dikitnya selama waktu yang sama dengan waktu istirahat hamil yang akan diberikan kepadanya.

Pasal 2

- Ayat (1) cukup jelas.
Ayat (2) Permintaan untuk memperpanjang waktu istirahat hamil, harus juga diajukan dengan tertulis disertai keterangan dokter yang diperlukan.

Pasal 3

Pemberian istirahat itu dilakukan dengan surat keputusan instansi/penjabat tersebut pasal 1 yang berhak memberi istirahat dalam Negeri kepada pegawai Daerah dan dalam surat keputusan itu dinyatakan tanggal mulainya dan lamanya istirahat itu, dan ditetapkan pula, bahwa pegawai berhak mendapat gaji penuh dan lain penghasilan yang sah selama istirahat yang diberikan kepadanya.

Pasal 4

Dalam menjalankan ketentuan dalam pasal ini hendaknya diperhatikan bahwa jikalau ternyata pegawai yang bersangkutan dengan sengaja mengabaikan kewajibannya dan ia masuk bekerja lagi hanya untuk sementara waktu saja, sehingga ia dapat dianggap tidak menepati perjanjiannya, maka ia dapat diberhentikan dari jabatannya, tidak disertai sebutan "dengan hormat".

Pasal 5

Didalam hal yang meragu-ragukan kebijaksanaan Dewan Pemerintah Daerah supaya diarahkan kepada keuntungan pegawai. Misalnya dimana tempat tidak ada seorang dokter, cukup dengan keterangan dari seorang bidan.

Pasal 6

Cukup jelas.